

POLITIK BAHASA: DINAMIKA KEKUASAAN, IDENTITAS, DAN PERENCANAAN BAHASA

Mashudi¹, Kuntoro²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia^{1,2}
e-mail: hudi69mashudi@gmail.com¹, kuntorosutaryo@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika politik bahasa di Indonesia khususnya pasca-reformasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan politik, konstruksi identitas, dan perencanaan bahasa nasional saling berinteraksi dan memengaruhi lanskap kebahasaan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis wacana, penelitian ini mengeksplorasi peran bahasa dalam arena politik, termasuk mobilisasi dukungan, pembentukan opini publik, dan representasi kelompok sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi kebijakan bahasa nasional, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pemertahanan bahasa daerah dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik bahasa pasca-reformasi di Indonesia ditandai oleh tarik-menarik antara penguatan bahasa nasional dan pelestarian bahasa daerah. Bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan sekaligus penanda identitas dalam berbagai arena politik dan sosial. Meski keberagaman bahasa diakui secara formal, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi publik. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan agar keberagaman bahasa dapat dikelola sebagai aset nasional yang memperkuat identitas, kohesi sosial, serta mendukung pembangunan sosial dan budaya di Indonesia yang multikultural dan multilingual.

Kata Kunci: *Politik Bahasa, Kekuasaan, Identitas, Perencanaan Bahasa*

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the dynamics of language politics in Indonesia, particularly in the post-reform era. The main focus is to identify how political power, identity construction, and national language planning interact and influence the linguistic landscape in Indonesia. Using a qualitative approach through case studies and discourse analysis, this research explores the role of language in the political arena, including the mobilization of support, the formation of public opinion, and the representation of social groups. Additionally, the study examines the implementation of national language policies, the challenges encountered, and their impact on the maintenance of regional languages and the development of Indonesian as both a unifying and global language. The findings indicate that post-reform language politics in Indonesia are marked by a tension between strengthening the national language and preserving regional languages. Language functions as both an instrument of power and a marker of identity in various political and social arenas. Although linguistic diversity is formally recognized, policy implementation still faces significant challenges, such as weak inter-agency coordination, limited resources, and low public participation. These findings highlight the need for inclusive, contextual, and sustainable language policies to manage linguistic diversity as a national asset that reinforces identity, social cohesion, and supports social and cultural development in a multicultural and multilingual Indonesia.

Keywords: *Language Politics, Power, Identity, Language Planning*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat keragaman etnolinguistik yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu wilayah dengan keanekaragaman bahasa terbesar di dunia. Lebih dari 700 bahasa daerah masih digunakan oleh komunitas-komunitas lokal di seluruh nusantara, hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan simbol integrasi nasional (Chaer & Agustina, 2010; Sumarsono, 2007). Bahasa Indonesia, yang awalnya berakar dari bahasa Melayu, diadopsi sebagai bahasa persatuan melalui proses imajinasi kolektif tentang bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh Anderson (1991) dalam konsep *imagined communities*. Bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen pembentukan identitas nasional.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa tetap relevan di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Studi oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam pembentukan identitas kebahasaan generasi muda, di mana penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang digital kerap dikombinasikan dengan bahasa daerah dan bahasa asing dalam bentuk *code-switching* yang mencerminkan identitas ganda mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi pergeseran bentuk penggunaan, bahasa Indonesia tetap menjadi referensi utama dalam interaksi lintas komunitas. Sementara itu, penelitian oleh Musyafa dan Suryani (2020) menyoroti urgensi revitalisasi bahasa daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga kekayaan budaya bangsa di tengah arus homogenisasi budaya global. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem kebahasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan kebahasaan di Indonesia perlu mengedepankan pendekatan yang seimbang, antara pelestarian bahasa daerah dan penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pilar identitas nasional.

Namun, lanskap kebahasaan Indonesia tidak bersifat statis. Era pasca-reformasi telah membawa perubahan struktural dalam bidang politik, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arah kebijakan dan praktik kebahasaan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa serta budaya lokal. Sementara itu, terbukanya ruang kebebasan berpendapat turut meningkatkan artikulasi identitas etnis dalam ruang publik, yang secara langsung berdampak pada dinamika politik bahasa nasional (Spolsky, 2004; Suhardi, 2019).

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan peluang positif bagi revitalisasi bahasa daerah, tantangan tetap muncul dalam menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan fungsi integratif bahasa Indonesia. Misalnya, studi oleh Musyafa dan Suryani (2020) menunjukkan bahwa penerapan kurikulum muatan lokal berbasis bahasa daerah di beberapa wilayah berhasil meningkatkan partisipasi siswa dan apresiasi terhadap bahasa ibu. Namun, dalam jangka panjang, hal ini juga memunculkan kekhawatiran terkait penurunan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia formal secara efektif, terutama dalam konteks akademik dan komunikasi antarwilayah. Sementara itu, penelitian oleh Daud dan Yasin (2019) menyoroti bahwa dalam konteks otonomi daerah, penggunaan bahasa daerah kadang dimanfaatkan sebagai simbol eksklusivitas etnis atau politik identitas, yang berpotensi memperlemah kohesi sosial nasional jika tidak diimbangi oleh kebijakan kebahasaan yang bersifat inklusif, adil, dan adaptif. Dengan demikian, dinamika kebahasaan dalam era desentralisasi menuntut kebijakan yang tidak hanya melindungi keragaman linguistik, tetapi juga memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Dalam konteks ini, politik bahasa tidak dapat dibatasi hanya pada tataran kebijakan formal yang dikeluarkan oleh negara, melainkan mencakup berbagai praktik linguistik yang

Copyright (c) 2025 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

berlangsung dalam berbagai domain sosial—seperti pendidikan, media, birokrasi, dan interaksi sehari-hari. Bahasa menjadi medium yang tidak netral; ia memainkan peran penting dalam mereproduksi relasi kuasa, menegosiasikan identitas kolektif, dan melegitimasi ideologi tertentu (Holmes, 2013; Heller, 2010; Hoed, 2014). Dalam wacana politik, misalnya, pilihan diksi, gaya tutur, dan simbol linguistik tertentu dapat digunakan untuk membangun citra, memperkuat klaim legitimasi, atau bahkan meminggirkan kelompok tertentu.

Pandangan ini selaras dengan teori sociolinguistik kritis yang memandang bahwa bahasa memiliki dimensi ideologis yang inheren. Fishman (1991) menekankan bahwa dalam konteks multibahasa, bahasa dapat menjadi sumber ketegangan ataupun strategi resistensi, tergantung pada bagaimana ia dikonseptualisasikan dan digunakan oleh para aktor sosial. Demikian pula, Heller (2010) menyoroti bahwa penggunaan bahasa dalam pendidikan dan media tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuknya, terutama dalam hal pembentukan identitas dan akses terhadap sumber daya sosial. Pandangan ini juga diperkuat oleh temuan-temuan dalam penelitian kontemporer yang menunjukkan bagaimana praktik kebahasaan tidak hanya merefleksikan, tetapi juga membentuk dinamika ideologis di masyarakat. Penelitian oleh Rachmawati dan Cahyono (2021) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran berbasis budaya lokal mampu meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat identitas kultural mereka. Dalam konteks ini, bahasa daerah tidak hanya menjadi alat pelestarian budaya, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi simbolik bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, studi oleh Hidayatullah (2020) mengungkap bahwa dalam ruang media sosial, praktik *code-mixing* oleh generasi muda sering kali mencerminkan sikap kritis terhadap tatanan sosial yang dominan, serta menjadi sarana untuk menegosiasikan identitas antara lokalitas, nasionalisme, dan globalisasi. Oleh karena itu, bahasa dapat dipahami tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam pembentukan identitas, relasi kuasa, dan perubahan sosial di masyarakat multibahasa seperti Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa analisis politik bahasa di Indonesia pasca-reformasi menjadi sangat krusial untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik secara lebih menyeluruh. Pemilihan bahasa, perencanaan kebahasaan, dan representasi linguistik bukan hanya mencerminkan struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga merupakan medan perjuangan yang aktif dalam membentuk arah perubahan sosial. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut bagaimana formulasi dan implementasi kebijakan bahasa nasional dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik, bagaimana bahasa berfungsi sebagai sarana konstruksi identitas sosial, serta tantangan dan peluang dalam mengelola keberagaman bahasa di Indonesia (Spolsky, 2004; Sumarsono, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi pustaka dan analisis wacana. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena politik bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Metode studi pustaka yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap isu yang dikaji dengan mengacu pada literatur yang telah tersedia. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan mencakup buku ilmiah, jurnal akademik, artikel dari media cetak seperti majalah dan surat kabar, dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang dan laporan riset, tesis dan disertasi, catatan sejarah, arsip, serta sumber daring yang kredibel.

Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana, yang

Copyright (c) 2025 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahasa dimanfaatkan dalam membangun makna, menegosiasikan identitas, serta menjalankan dan mereproduksi kekuasaan dalam berbagai bentuk teks dan konteks. Pendekatan ini mencakup beberapa level analisis, yaitu analisis leksikal dan gramatikal untuk mengidentifikasi pilihan kata dan struktur kalimat yang mengandung muatan politis, analisis retorika untuk menelusuri strategi persuasif yang digunakan dalam wacana politik, serta analisis naratif yang berfokus pada bagaimana konstruksi cerita dan representasi linguistik membentuk persepsi serta opini publik. Selain itu, analisis juga akan dilakukan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis* atau CDA) guna mengungkap ideologi-ideologi yang tersembunyi di balik praktik kebahasaan dan relasi kekuasaan yang direproduksi melalui bahasa.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Portal Garuda (Garba Rujukan Digital Indonesia). Peneliti menggunakan sejumlah kata kunci yang relevan dengan topik *Politik Bahasa: Dinamika Kekuasaan, Identitas, dan Perencanaan Bahasa*, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, antara lain *language politics*, *language policy*, *language and identity*, *language planning*, *sociolinguistic power dynamics*, *bahasa dan kekuasaan*, *politik bahasa di Indonesia*, *perencanaan bahasa Indonesia*, *identitas etnis dan bahasa*, *multilingualism in Indonesia*, dan *language ideology*. Pencarian literatur ini bertujuan untuk menjangkau berbagai teori dan hasil temuan sebelumnya yang relevan. Jumlah sumber yang dianalisis dalam kajian ini sebanyak 22 sumber. Selain itu, data penelitian juga dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti dokumen kebijakan bahasa, transkrip pidato politik, artikel media, unggahan media sosial, dan berbagai materi publik lainnya yang berkaitan dengan isu politik bahasa di Indonesia.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi, kategorisasi, kodifikasi, dan interpretasi. Analisis dilakukan secara iteratif dan mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola linguistik, tema-tema dominan, serta relasi-relasi sosial-politik yang terbangun melalui penggunaan bahasa. Pendekatan analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan dalam membangun kekuasaan, membentuk identitas, dan melegitimasi ideologi tertentu. Dalam proses ini, jika diperlukan, peneliti akan menggunakan perangkat lunak bantu analisis data kualitatif guna mempermudah proses pengolahan dan penataan data, serta meningkatkan akurasi dalam proses penafsiran makna dan relasi yang terkandung di dalamnya.

PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan mengenai politik bahasa dan kebijakan kebahasaan di Indonesia menunjukkan bahwa isu bahasa tidak hanya menyangkut aspek linguistik, tetapi juga berkaitan erat dengan kekuasaan politik, identitas budaya, dan dinamika sosial yang kompleks. Bahasa menjadi alat strategis dalam membangun kohesi nasional, memperkuat identitas lokal, serta menjaga keberlanjutan warisan budaya. Dalam konteks ini, kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta respons masyarakat terhadapnya, merupakan wujud dari interaksi yang dinamis antara struktur kekuasaan dan keberagaman linguistik. Untuk memahami lebih jauh bagaimana isu-isu ini direspons dalam berbagai konteks, berikut disajikan tabel hasil penelitian yang merangkum empat fokus utama dalam kajian politik bahasa dan kebijakan kebahasaan di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Penelitian: Politik Bahasa dan Kebijakan Kebahasaan di Indonesia

No	Fokus Kajian	Temuan Utama	Sumber
1.	Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Kebijakan Bahasa Nasional	Kekuasaan politik pusat dan daerah sangat menentukan arah kebijakan bahasa. Ideologi dan kepentingan politik memengaruhi isi dan fokus kebijakan. Implementasi kebijakan terlihat dalam UU No. 24/2009, UU No. 22/1999 & 32/2004, serta Perda Bali No. 1/2017 tentang perlindungan bahasa dan sastra daerah.	Spolsky (2004), Tollefson (2006), Matatula & Tupalessy (2025), Supriadi et al. (2022), Hamied & Musthafa (2023)
2.	Bahasa sebagai Alat Konstruksi Identitas	Bahasa berperan dalam membentuk identitas etnis dan nasional. Bahasa Indonesia sebagai simbol nasional, sementara bahasa daerah memperkuat identitas lokal. Implementasi mencakup Kurikulum Bahasa Indonesia, kampanye “Utamakan Bahasa Indonesia”, EYD/PUEBI, serta penggunaan bahasa daerah di sekolah dasar sebagai penguatan budaya lokal.	Heller (2010), Anderson (1991), Hoerudin (2024), Fitriati & Rata (2021), Budiono & Yanita (2024), Hoed (2014)
3.	Interaksi Perencanaan Bahasa Nasional dan Pemertahanan Bahasa Daerah	Perencanaan bahasa harus menyeimbangkan antara penguatan bahasa nasional dan pelestarian bahasa daerah. Ketegangan muncul karena perbedaan pendekatan dan legitimasi. Implementasi melalui program muatan lokal bahasa daerah, revitalisasi bahasa, Perda bahasa, serta integrasi kosakata lokal ke dalam Bahasa Indonesia untuk memperkaya bahasa nasional dan menjaga keberagaman linguistik.	Dardjowidjojo (2000), Fishman (1991), Mahsun (2000), Hamka (2023), Simanjuntak (2021)
4.	Tantangan dan Peluang dalam Mengelola Keberagaman Bahasa	Tantangan meliputi konflik sosial, marginalisasi, dan dominasi bahasa nasional. Peluang mencakup peningkatan kognitif, pluralitas identitas, dan kompetensi global. Implementasi melalui pendidikan multibahasa, pelajaran berbasis bahasa ibu, studi banding ke negara seperti Swiss, Kanada, India, dan keterlibatan komunitas bahasa dalam penyusunan kebijakan.	Chaer & Agustina (2010), Suhardi (2019), Sumarsono (2007, 2019), Lubis et al. (2023), Zulfadhli et al. (2023), Wahabun, (2023)

Pembahasan

Dalam bagian ini akan menyajikan hasil analisis dari temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pembahasan disusun secara sistematis mengikuti rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, guna memastikan setiap permasalahan dapat dikaji secara mendalam dan menyeluruh.

1. Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Kebijakan Bahasa Nasional

Kekuasaan politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan multidimensional terhadap formulasi dan implementasi kebijakan bahasa nasional. Pemerintah pusat, sebagai pemegang otoritas tertinggi, memiliki kapasitas untuk menentukan arah kebijakan bahasa melalui undang-undang, peraturan, dan program strategis. Kepentingan politik yang mendasari kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan efektivitas komunikasi, tetapi juga mencerminkan visi ideologis seperti nasionalisme, pluralisme, atau stabilitas politik pragmatis (Spolsky, 2004; Tollefson, 2006). Perubahan politik yang terjadi melalui pemilu maupun pergeseran koalisi kekuasaan dapat berdampak langsung pada fokus dan prioritas kebijakan bahasa yang dihasilkan. Misalnya, dalam konteks pendidikan dasar, Matatula dan Tupalessy (2025) menunjukkan bahwa kebijakan bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum nasional, tetapi juga oleh kebutuhan untuk mengakomodasi bahasa lokal dan tuntutan global seperti penguatan bahasa asing. Hal ini menegaskan bahwa politik bahasa selalu berada dalam arena negosiasi antara kekuasaan negara, kepentingan lokal, dan pengaruh global.

Pasca-reformasi, peran pemerintah daerah semakin krusial dalam pelaksanaan kebijakan bahasa. Otonomi daerah membuka ruang bagi pemerintah lokal untuk merespons kebutuhan budaya dan linguistik masing-masing wilayah. Berdasarkan temuan Hamied dan Musthafa (2023), daerah-daerah di Indonesia kini mulai menunjukkan inisiatif dalam merancang kebijakan pelestarian bahasa daerah, meskipun sering kali dihadapkan pada kendala anggaran dan sumber daya manusia. Dalam kerangka analisis wacana kritis terhadap kebijakan Presiden No. 63 Tahun 2019, Supriadi et al. (2022) menegaskan bahwa pemilihan diksi dan formulasi peraturan mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Di sisi lain, partai politik melalui perannya di legislatif juga mempengaruhi arah kebijakan bahasa melalui perumusan undang-undang dan fungsi pengawasan. Dinamika ini dipengaruhi oleh ideologi partai, strategi elektoral, serta tekanan dari masyarakat sipil dan opini publik. Oleh karena itu, kebijakan bahasa nasional bukan sekadar hasil pertimbangan linguistik teknis, melainkan produk dari kontestasi kepentingan berbagai aktor politik.

Kebijakan atau regulasi sebagai bentuk korelasi kekuasaan terhadap kebijakan bahasa tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah pasca reformasi di antaranya;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004): Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan kebudayaan dan bahasa. Ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Contohnya, beberapa daerah menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang pelestarian bahasa daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: Pasal 42 ayat (1) menyatakan, "Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah." Ini adalah landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam pelestarian bahasa daerah, yang sebelumnya kurang ditekankan pada era sentralistik.
3. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Bahasa Daerah: Banyak pemerintah daerah yang, didorong oleh kepentingan politik lokal (misalnya, melestarikan identitas budaya untuk menarik dukungan atau pariwisata), mengesahkan perda yang mewajibkan

penggunaan bahasa daerah dalam acara resmi tertentu, atau mengintegrasikan pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum lokal. Contoh, perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Perda ini merupakan contoh konkret bagaimana kepentingan politik lokal untuk melestarikan budaya dan identitas daerah memengaruhi kebijakan bahasa di tingkat daerah. Contoh lainnya adalah beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat kebijakan untuk menggunakan bahasa Jawa dalam upacara-upacara adat atau dalam materi pelajaran muatan lokal di sekolah.

Secara keseluruhan, kebijakan bahasa nasional pasca-reformasi telah menunjukkan kemajuan dalam mengakui dan merespons kompleksitas kebahasaan di Indonesia. Namun, efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuannya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal implementasi di lapangan dan koordinasi antar lembaga. Pengaruh globalisasi, kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan kompleksitas konteks multilingual dan multikultural menjadi faktor penghambat utama.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bahasa nasional di masa depan, diperlukan penguatan koordinasi dengan tujuan membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur antar lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Upaya peningkatan alokasi sumber daya juga perlu dilakukan. Mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai mutlak diperlukan untuk mewujudkan program-program bahasa, terutama untuk pelestarian bahasa daerah. Usaha lain yang harus dilakukan adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan cara mengintensifkan sosialisasi dan edukasi tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar serta nilai bahasa daerah. Upaya lain yang bisa ditempuh yakni melakukan pengembangan kebijakan yang lebih kontekstual dengan cara merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks multilingual dan multikultural di berbagai daerah. Selanjutnya, hal lain yang bisa ditempuh yaitu melakukan penguatan monitoring dan evaluasi. Usaha mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan dan mengidentifikasi area perbaikan. Respons terhadap tantangan global juga layak dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif yakni, mengembangkan strategi untuk menghadapi pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap penggunaan bahasa. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan kebijakan bahasa nasional dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk memperkuat Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan meningkatkan literasi serta kesadaran berbahasa di Indonesia.

2. Bahasa sebagai Alat Konstruksi Identitas

Bahasa memainkan peran sentral dalam wacana politik untuk membangun dan menegosiasikan identitas etnis, regional, dan nasional melalui berbagai cara yang saling terkait. Sebagai penanda identitas, bahasa (termasuk dialek, aksen, dan gaya bicara) secara inheren mengasosiasikan individu dengan kelompok etnis atau wilayah geografis tertentu, menciptakan rasa “kita” dan “mereka” dalam arena politik (Heller, 2010; Anderson, 1991). Penggunaan bahasa etnis atau dialek regional oleh politisi dapat secara strategis membangkitkan solidaritas dan dukungan dari kelompok pemilih tertentu, menunjukkan kedekatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal (Hoerudin, 2024). Sebaliknya, penolakan atau stigmatisasi terhadap variasi bahasa tertentu dalam wacana politik nasional dapat memicu sentimen identitas yang kuat sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi atau marginalisasi. Pada tingkat nasional, bahasa persatuan seperti Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol kohesif yang digunakan untuk membangun narasi inklusif tentang kebangsaan dan rasa memiliki bersama di antara warga negara yang beragam (Fitriati & Rata, 2021). Pemerintah pasca-reformasi pun merespons pentingnya bahasa sebagai identitas nasional melalui kebijakan formal, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia secara resmi dalam pendidikan, komunikasi pemerintahan, media massa, dan ranah publik lainnya.

Selain mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang, pemerintah juga melakukan berbagai terobosan agar konstruksi identitas nasional melalui bahasa bisa berjalan efektif, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Memberlakukan Kurikulum Pendidikan Nasional sejak SD hingga perguruan tinggi, Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib dan bahasa pengantar utama. Tujuan utamanya adalah memastikan semua warga negara menguasai Bahasa Indonesia, sehingga memupuk rasa kebangsaan dan identitas Indonesia.
2. Kampanye "Cinta Bahasa Indonesia". Pemerintah (melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) secara berkala mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan akan Bahasa Indonesia. Slogan-slogan seperti "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing" adalah contoh nyata.
3. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Upacara Kenegaraan dan Pidato Pejabat Publik: Semua upacara kenegaraan, misalnya, peringatan Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda) dan pidato Presiden, menteri, atau pejabat publik lainnya selalu menggunakan Bahasa Indonesia. Ini adalah simbol kuat persatuan dan identitas nasional yang ditransmisikan secara konsisten.
4. Standardisasi Ejaan (EYD, PUEBI): Pembakuan ejaan (seperti Ejaan Yang Disempurnakan - EYD, yang kemudian diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia - PUEBI) adalah upaya pemerintah untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan dan penggunaan Bahasa Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat identitas kebahasaan nasional.

Lebih lanjut, bahasa dalam wacana politik tidak hanya menandai identitas, tetapi juga aktif mengonstruksi narasi dan ideologi terkait identitas tersebut. Pilihan kata, metafora, dan gaya bahasa digunakan untuk membingkai isu-isu politik dengan cara yang menguntungkan atau merugikan kelompok identitas tertentu, melegitimasi aspirasi mereka, atau justru mendelegitimasi tuntutan kelompok lain (Budiono & Yanita, 2024; Hoed, 2014). Bahasa menjadi arena negosiasi kekuasaan dan status, di mana kelompok minoritas dapat menggunakan bahasa mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi bahasa mayoritas, menuntut pengakuan, atau melakukan akomodasi linguistik sebagai strategi politik. Di saat yang sama, bahasa membawa nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah, yang dapat diaktifkan dalam wacana politik untuk membangkitkan memori kolektif dan memperkuat rasa memiliki terhadap warisan bersama, sehingga memperkuat identitas etnis, regional, atau nasional.

Dalam memperkuat solidaritas kelompok (*in-group*) dan membedakan diri dari kelompok lain (*out-group*), berbagai strategi linguistik digunakan secara sadar maupun tidak sadar dalam wacana. Salah satu strategi utama adalah penggunaan leksikon dan jargon khusus yang hanya dipahami oleh anggota kelompok, menciptakan rasa eksklusivitas dan keintiman. Gaya bahasa, intonasi, dan pilihan kata menjadi penanda keanggotaan dan memperkuat kohesi kelompok. Sebaliknya, strategi untuk mengecualikan kelompok luar sering kali melibatkan penggunaan bahasa yang berbeda secara situasional, stereotip linguistik, serta penggunaan istilah peyoratif yang mempertegas perbedaan. Bahkan, perbedaan dalam topik, struktur narasi, dan tingkat formalitas bahasa antara interaksi dengan *in-group* dan *out-group* dapat memperkuat batas identitas secara halus namun signifikan.

Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah kontroversi penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kebijakan ini ditujukan untuk melestarikan bahasa daerah dan memperkuat identitas budaya lokal sejak dini,

namun menimbulkan perdebatan tajam. Pihak yang mendukung—terdiri dari tokoh budaya, akademisi, dan masyarakat lokal—menganggap kebijakan ini sebagai upaya menjaga kearifan lokal dan memupuk rasa kebangsaan berbasis budaya (Budiono & Yanita, 2024). Mereka berpendapat bahwa pembelajaran dalam bahasa ibu dapat meningkatkan pemahaman konsep dan mempererat keterikatan terhadap budaya asal. Namun, kelompok yang menentang, terutama dari kalangan orang tua dan masyarakat multietnis, memandangnya sebagai penghambat kemajuan pendidikan nasional dan mobilitas sosial karena dianggap mengurangi fokus terhadap Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dianggap lebih strategis untuk masa depan. Kontroversi ini menunjukkan bagaimana kebijakan bahasa menjadi arena perebutan identitas dan kekuasaan dalam kebijakan publik, yang tidak hanya menyentuh aspek linguistik, tetapi juga politik representasi dan legitimasi kelompok.

3. Interaksi Perencanaan Bahasa Nasional dengan Pemertahanan Bahasa Daerah dan Pengembangan Bahasa Indonesia:

Interaksi antara perencanaan bahasa nasional dengan pemertahanan bahasa daerah dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik, ideologis, dan kultural. Secara ideal, kebijakan dan program perencanaan bahasa nasional dirancang untuk mengakomodasi dua tujuan utama: memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa ilmu pengetahuan, serta melestarikan kekayaan linguistik dari ratusan bahasa daerah di Indonesia (Dardjowidjojo, 2000; Fishman, 1991). Namun, dalam praktiknya, ketegangan sering muncul ketika upaya memodernisasi dan membakukan Bahasa Indonesia dianggap mengancam eksistensi bahasa daerah. Kebijakan yang terlalu sentralistik dan dominan pada aspek nasional sering kali tidak memberikan ruang yang memadai bagi ekspresi linguistik lokal, sementara pendekatan yang terlalu otonomis tanpa dukungan kelembagaan dari pusat berpotensi melemahkan kohesi nasional (Mahsun, 2000; Simanjuntak, 2021). Hamka (2023) menunjukkan bahwa situasi diglosia di Indonesia—di mana Bahasa Indonesia menempati ranah formal sementara bahasa daerah digunakan di ranah informal—menimbulkan ketidakseimbangan dalam legitimasi dan transmisi intergenerasional. Oleh karena itu, perencanaan bahasa nasional yang efektif harus menyeimbangkan kedua arah ini dengan strategi terintegrasi, sensitif konteks, dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal di atas pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Pasal 42): "Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah." Ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam pelestarian bahasa daerah dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Bahasa Daerah. Banyak pemerintah daerah yang, berdasarkan UU No. 24/2009 dan semangat otonomi, mengesahkan perda untuk melindungi dan mengembangkan bahasa daerah mereka. Selain itu, pemerintah juga menyusun program dan kegiatan, di antaranya;

1. Mata Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Bahasa Daerah. Di banyak provinsi, bahasa daerah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib atau pilihan di sekolah-sekolah, dari tingkat dasar hingga menengah. Ini bertujuan untuk menanamkan identitas lokal kepada generasi muda. Contoh, di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pelajaran Bahasa Jawa wajib di sekolah. Di Bali, pelajaran Bahasa Bali.
2. Penggunaan Bahasa Daerah dalam Acara Adat/Resmi Lokal. Beberapa pemerintah daerah mewajibkan penggunaan bahasa daerah dalam acara-acara adat, rapat resmi tertentu, atau pada hari-hari tertentu. Contoh, Pemerintah Provinsi Bali melalui Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali mewajibkan penggunaan pakaian adat dan berbahasa Bali setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, serta hari jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki

kebijakan untuk menghidupkan kembali penggunaan Bahasa Jawa Krama dalam acara-acara formal pemerintahan, sebagai bagian dari pelestarian identitas Kejawen.

3. **Revitalisasi Bahasa Daerah:** Program-program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat (melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) dan pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali bahasa daerah yang terancam punah. Ini melibatkan pelatihan guru, penyusunan kamus, dan produksi materi bacaan berbahasa daerah. Contoh, Program revitalisasi yang menyasar puluhan bahasa daerah di berbagai provinsi di Indonesia, seringkali bekerja sama dengan komunitas adat.

Evaluasi terhadap kebijakan dan program perencanaan bahasa nasional menjadi penting untuk mengukur efektivitas implementasi dan dampaknya dalam mewujudkan tujuan ganda tersebut. Evaluasi ini memerlukan keterlibatan multi-aktor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas penutur bahasa daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Selain indikator formal seperti peningkatan penggunaan Bahasa Indonesia di sektor pendidikan, pemerintahan, dan media, indikator keberhasilan lain yang perlu dipertimbangkan adalah vitalitas bahasa daerah, transmisi antargenerasi, dan persepsi masyarakat terhadap nilai bahasa mereka (Budiono & Yanita, 2024).

Salah satu contoh praktik perencanaan bahasa nasional yang menyeimbangkan antara pelestarian bahasa daerah dan penguatan Bahasa Indonesia adalah integrasi muatan lokal bahasa daerah dalam Kurikulum 2013. Meski di sejumlah wilayah pengajaran berjalan efektif, di daerah lain kebijakan ini mengalami kendala signifikan, seperti kekurangan guru, minimnya materi ajar, serta lemahnya dukungan orang tua (Simanjuntak, 2021). Di sisi lain, upaya Badan Bahasa untuk menyerap dan mengadaptasi kosakata bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia mencerminkan strategi top-down dalam memperkaya bahasa nasional sambil tetap memberi ruang bagi pengakuan bahasa lokal. Namun, tantangan utama tetap pada aspek diseminasi dan penerimaan publik. Dalam konteks ini, perencanaan bahasa tidak dapat dipandang sebagai proyek teknokratis semata, melainkan harus dilihat sebagai proses sosial-politik yang menyentuh dimensi identitas, hak budaya, dan akses terhadap sumber daya bahasa. Upaya mempertahankan bahasa daerah yang terancam punah dan mendorong perkembangan Bahasa Indonesia dalam ranah global memerlukan sinergi kebijakan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan (Fishman, 1991; Hamka, 2023).

4. Tantangan dan Peluang dalam Mengelola Keberagaman Bahasa

Mengelola keberagaman bahasa di negara multilingual seperti Indonesia menghadirkan tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik sosial dan ketegangan etnolinguistik yang dapat muncul akibat persepsi ketidakadilan dalam kebijakan bahasa atau dominasi satu bahasa atas bahasa lainnya (Chaer & Agustina, 2010; Suhardi, 2019). Dominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, misalnya, dapat dipersepsikan sebagai bentuk hegemoni linguistik oleh kelompok penutur bahasa daerah, terutama bila tidak ada kebijakan pelindung yang eksplisit terhadap bahasa minoritas. Risiko lain yang juga mengancam adalah marginalisasi dan kepunahan bahasa daerah, akibat tekanan sosial dan ekonomi yang membuat bahasa nasional atau bahasa global lebih diutamakan dalam sistem pendidikan dan ruang publik (Sumarsono, 2007, 2019). Penelitian terkini oleh Lubis et al. (2023) menyoroti melemahnya penguasaan bahasa baku di kalangan mahasiswa, yang mengindikasikan tantangan pelestarian norma bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, hambatan komunikasi dan koordinasi antar kelompok masyarakat yang berbeda bahasa juga dapat menghambat pembangunan nasional secara sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah menghadapi dilema besar dalam merumuskan kebijakan bahasa yang adil, inklusif, dan efektif, terutama dalam konteks terbatasnya sumber daya dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami prinsip multilingualisme secara mendalam (Zulfadhli

et al., 2023; Wahabun, 2023).

Namun di balik tantangan-tantangan tersebut, keberagaman bahasa Indonesia menyimpan potensi dan peluang luar biasa. Bahasa merupakan bagian dari warisan budaya yang sarat nilai, pengetahuan lokal, dan perspektif unik tentang kehidupan. Multilingualisme memberikan dampak positif terhadap pengembangan kognitif individu, termasuk fleksibilitas berpikir, kreativitas, dan keterampilan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa menjadi aset strategis dalam dunia kerja global dan industri pariwisata. Keanekaragaman bahasa juga membuka peluang untuk memperkuat identitas nasional yang plural dan inklusif, di mana seluruh komunitas bahasa merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari bangsa (Sumarsono, 2019). Pendidikan multibahasa menjadi salah satu pendekatan strategis yang diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman ini. Pendidikan berbasis bahasa ibu terbukti meningkatkan pencapaian akademik pada tahap awal dan memperkuat identitas budaya peserta didik. Namun, pelaksanaan pendidikan multibahasa masih menghadapi hambatan teknis dan kebijakan, mulai dari kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, keterbatasan bahan ajar, hingga belum optimalnya regulasi nasional (Zulfadhli et al., 2023). Dalam konteks perbandingan internasional, negara seperti Swiss, Kanada, dan India telah menunjukkan berbagai model kebijakan bahasa yang relatif sukses dalam mengelola pluralisme linguistik. Dari studi kasus negara-negara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan konstitusional terhadap bahasa, dukungan anggaran, keterlibatan komunitas lokal, dan pendekatan kebijakan yang adaptif merupakan prasyarat penting bagi pengelolaan kebijakan bahasa yang adil dan efektif. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut untuk menyempurnakan pendekatan kebijakan dalam merespons tantangan keberagaman bahasa di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Paparan di atas secara komprehensif menggambarkan kompleksitas politik bahasa di Indonesia pasca-reformasi. Kekuasaan politik memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan bahasa nasional, mulai dari perumusan undang-undang dan peraturan pemerintah hingga implementasi program-program bahasa. Kepentingan dan ideologi berbagai aktor politik, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta partai politik, saling berinteraksi dan memengaruhi arah kebijakan, seringkali dengan tarik-menarik antara penguatan bahasa nasional dan pelestarian bahasa daerah. Evolusi kebijakan pasca-reformasi menunjukkan adanya pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman bahasa, namun tantangan implementasi dan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala utama.

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan instrumen penting dalam membangun dan menegosiasikan identitas etnis, regional, dan nasional dalam wacana politik. Strategi linguistik digunakan untuk memperkuat solidaritas kelompok dan membedakan diri dari kelompok lain, seringkali termanifestasi dalam isu-isu konkret seperti penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan atau penamaan ruang publik yang menjadi arena kontestasi identitas dan kekuasaan. Interaksi antara perencanaan bahasa nasional dengan pemertahanan bahasa daerah dan pengembangan bahasa Indonesia memerlukan keseimbangan yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kedua tujuan ini dapat tercapai secara sinergis.

Mengelola keberagaman bahasa di Indonesia menghadirkan tantangan signifikan, termasuk potensi konflik, marginalisasi bahasa minoritas, dan kesulitan koordinasi. Namun, di balik tantangan tersebut tersembunyi peluang besar berupa kekayaan budaya, peningkatan kognitif, dan potensi ekonomi. Diskusi mengenai pendidikan multibahasa muncul sebagai salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengelola keberagaman ini secara inklusif. Belajar dari pengalaman negara-negara multilingual lainnya menunjukkan pentingnya pengakuan

konstitusional, kebijakan yang adil, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bahasa nasional di masa depan, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan kebijakan yang lebih kontekstual, penguatan monitoring dan evaluasi, serta respons terhadap tantangan global menjadi langkah-langkah krusial. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat mengelola keberagaman bahasanya sebagai aset bangsa yang memperkaya identitas nasional dan memperkuat kohesi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Budiono, I., & Yanita, R. (2024). Language documentation practices in Indonesia: A critical theory perspective. *Lingua Cultura*, 18(1), 23–34. <https://journal.binus.ac.id/index.php/lingua/article/view/11878>
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan awal*. Rineka Cipta.
- Dardjowidjojo, S. (2000). Perencanaan Bahasa di Indonesia: Sejarah dan Prospek. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 18(1), 1-18. (Jika ada studi spesifik tentang perencanaan bahasa di Indonesia)
- Daud, M. Y., & Yasin, B. (2019). Language Policy and Language Planning in Multilingual Indonesia: Challenges and Future Directions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 362–371. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185>
- Fishman, J. A. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. *Multilingual Matters*.
- Fitriati, S. W., & Rata, E. (2021). Language, globalisation, and national identity: A study of English-medium policy and practice in Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 11(2), 237–248. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i2.284>
- Hamied, F. A., & Musthafa, B. (2023). Policies on language education in Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/ijal.v13i1.20279>
- Hamka, M. (2023). Language policy and planning: Diglossia in Indonesia. *Pencerah: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 74–85. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/1948>
- Heller, M. (2010). Language and identity. In N. H. Hornberger & S. L. McKay (Eds.), *Sociolinguistics and language education* (pp. 151-179). *Multilingual Matters*.
- Hidayatullah, H. (2020). Code Mixing in Social Media: Between Identity and Ideology among Indonesian Youth. *Proceedings of the International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE)*, 4(1), 142–150. <https://doi.org/10.2991/icollite-19.2020.26>
- Hoed, Benny H. (2014). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Komunitas Budaya Bambu.
- Hoerudin, C. W. (2024). The influence of language in forming political identity in Indonesia. *Semantik: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13(1), 50–60. <https://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/semantik/article/view/3633>
- Holmes, J. (2013). *An introduction to sociolinguistics* (4th ed.). Routledge.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara. (Catatan: Ini kemudian diganti oleh

- UU No. 32 Tahun 2004)
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lubis, A. H., Hasanah, S., & Wulandari, A. (2023). Language proficiency in standard and non-standard language among students: A sociolinguistic study. *Pencerah: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 120–132. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/1948>
- Mahsun. (2000). Dialektologi Diakronis Bahasa Melayu di Indonesia Barat. UI Press
- Matatula, H. B., & Tupalessy, J. A. (2025). Language policy in Indonesian elementary schools: Balancing national, local, and foreign languages. *Jurnal Huele*, 6(1), 45–58. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/huele/article/view/16980>
- Musyafa, M., & Suryani, S. (2020). Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Konteks Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.22146/jsp.51467>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2017). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Bali: Pemerintah Provinsi Bali.
- Prasetyo, W. (2021). Bahasa Indonesia dan Identitas Anak Muda di Media Sosial: Antara Nasionalisme dan Globalisasi. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(1), 35–48. <https://doi.org/10.26740/jbsi.v9n1.p35-48>
- Rachmawati, Y., & Cahyono, B. Y. (2021). The Use of Local Culture-Based Materials to Promote Students' Engagement and Identity in Primary Education. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 11(1), 123–134. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34628>
- Simanjuntak, M. (2021). Bahasa Indonesia: Policy, implementation, and planning. *Lingua Cultura*, 15(2), 97–105. <https://journal.binus.ac.id/index.php/lingua/article/view/327>
- Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge University Press.
- Suhardi. (2019). Sociolinguistik. Gadjah Mada University Press.
- Sumarsono. (2007). Sociolinguistik. Yogyakarta: Sabda.
- Sumarsono. (2019) Variasi Bahasa. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Supriadi, H., Nurlaelawati, I., & Kurniawan, E. (2022). Discourse analysis on language policy in Presidential Regulation No. 63/2019. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, 10(1), 11–20. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/view/4191>
- Tollefson, J. W. (2006). Language policy and the means of linguistic reproduction. *Language Policy*, 5(3), 207–227.
- Wahabun, N. L. I. (2023). Ministry policy related to subjects Indonesian language and literature in school. *JLILS: Journal of Language, Literature and Islamic Studies*, 3(1), 18–25. <https://jlils.pjj.unp.ac.id/index.php/jlils/article/view/50>
- Zulfadhli, A., Marlina, L., & Ningsih, S. (2023). Kebijakan pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi: Implementasi dan tantangannya. *Semantik: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13(1), 25–34. <https://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/semantik/article/view/3633>